

***Open Access* dalam Membangun Masyarakat Literat untuk Mendukung Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan**

Rika Yuliant

Perpustakaan Universitas Telkom
Bandung Technoplex, Bojongsoang, Kab. Bandung
rikayuliant@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Literasi merupakan salah satu dari agenda besar dunia yang dikeluarkan oleh United Nations yang terangkum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan 4 dari SDGs adalah berkaitan dengan kualitas pendidikan (*quality education*) yang menjadi kerangka kerja UNESCO yang akan dicapai pada 2030 dalam membangun literasi yaitu memastikan bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki ataupun wanita memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Untuk mencapai tujuan tersebut perpustakaan memiliki peran penting dan kontribusi dalam penyediaan akses terhadap informasi untuk membangun masyarakat literat yang mampu mendorong pembangunan berkelanjutan. Penyediaan kemudahan akses terhadap informasi dan penggunaan fasilitas teknologi dilakukan oleh Telkom University Open Library melalui konsep *open access* perpustakaan. *Open access* dengan platform terbuka secara infrastruktur dan kegiatan pengembangan pengetahuan dan komunitas. Peran pustakawan dalam rangka mewujudkan masyarakat literat melalui *open access* dilakukan dengan pengembangan *liaison librarian*.

Kata Kunci: Perpustakaan, literasi, *open access*, pembangunan berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

Salah satu agenda dunia internasional adalah menuju masyarakat literat (*literate society*) hal ini tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh UNESCO. SDGs memiliki 17 tujuan yang terbagi dalam 169 target dan 241 indikator. Tujuan-tujuan dari SDGs tersebut dipetakan pada empat pilar pembangunan yang terdiri dari: pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. 17 tujuan SDGs dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1: *Sustainable Development Goals* (Sumber: Global Goals www.globalgoals.org)

Organisasi-organisasi dunia yang memiliki tanggung jawab dan perhatian dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dunia meyakini bahwa literasi merupakan kunci dari belajar sepanjang hayat yang merupakan bagian dari seperangkat kompetensi kunci (yang lebih luas) yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Secara eksplisit tercantum dalam tujuan ke 4 SDGs (*Quality Education*) dan merupakan target pembangunan literasi pada tahun 2030 yaitu “*ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy*”. Data literasi masyarakat dunia berdasarkan data dari UNESCO (2016) menunjukkan bahwa sebesar 95.38% masyarakat Indonesia usia dewasa berada pada rata-rata 95.38%, berdasarkan gender untuk laki-laki rata-rata tingkat literasi di Indonesia adalah sebesar 97.17% dan sebesar 93.59% untuk wanita.

Membandingkan dengan peringkat ke 57 dalam ranking tingkat literasi merupakan hal yang harus menjadi perhatian mengingat bahwa masyarakat literat merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang disampaikan oleh UNESCO.

Sejak dimulainya *International Literacy Day* yang pertama pada tahun 1966 di Teheran yang diawali dengan *World Conference of Minister on The Eradication of Literacy* yang menimbulkan kesadaran bahwa literasi lebih dari sekedar kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung namun “*literacy should be regarded as a way of preparing man for a social, civic, and economic role*” - literasi menjadi dasar dalam mempersiapkan manusia untuk berperan dalam kehidupan social, bernegara dan ekonomi. Hingga pada tahun 2015 melalui Incheon Declaration literasi diyakini sebagai dasar dasar untuk *lifelong learning* yang merupakan kompetensi kunci untuk pembangunan berkelanjutan (UN, 2016)

Indonesia sebagai bangsa yang berperan aktif dalam pencapaian tujuan universal memasukkan tujuan-tujuan SDGs dalam rencana pembangunan nasional, salah satu diantaranya melalui Kebijakan Pembangunan Perpustakaan untuk Peningkatan Kesejahteraan melalui Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan yang merupakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Penguatan literasi untuk kesejahteraan menjadi kegiatan prioritas untuk mendukung program prioritas percepatan pengurangan kemiskinan, dilakukan melalui Proyek Prioritas Nasional yang terdiri dari: 1. Literasi informasi terapan dan inklusif, 2. Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, 3. Pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial (Kementrian PPN/Bappenas, 2018).

Peran perpustakaan dalam SDGs dan sinergi lintas sektor disampaikan oleh Bappenas meliputi:

- a. Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan melalui Pemerataan akses pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan (Perpusnas, Kemendesa, Kemendagri, Kemenkominfo, Kementrian PUPR)

- b. Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan melalui peningkatan literasi gaya hidup sehat untuk mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular
- c. Tujuan 4 : Menjamin Pendidikan Berkualitas melalui program menumbuhkan budaya kegemaran membaca
- d. Tujuan 5 : Mencapai Kesejahteraan Gender dan Memberdayakan Perempuan dengan meningkatkan akses literasi terapan untuk pemberdayaan perempuan)
- e. Tujuan 8 : Ketersediaan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Meningkatkan akses literasi terapan bagi pemuda)
- f. Tujuan 9 : Pengembangan Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Penyediaan e-resources untuk mendukung riset dan pengembangan inovasi)
- g. Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim (Menumbuhkan kesadaran perubahan iklim melalui akses literasi informasi berbasis TIK).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia berada pada peringkat 86 dari 121 negara yang ada di dunia. Sedangkan di Jawa Barat sendiri kondisi literasi masyarakat Jawa Barat tercatat sebanyak 604.683 masyarakat Jawa Barat buta huruf (BPS, 2015). Berdasarkan hasil penelitian dan data tersebut diketahui bahwa penyebab rendahnya tingkat literasi masyarakat adalah karena keterbatasan terhadap sumber, baik berupa sumber bacaan maupun sumber informasi lainnya.

Kemudahan akses terhadap sumber informasi merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat literasi suatu masyarakat, sebagaimana yang disampaikan dalam *World's Most Literate Nations* bahwa indikator masyarakat literat suatu bangsa terdiri dari: “*libraries, newspaper, education inputs and outputs, and computer availability*” (2015). Perpustakaan sebagai salah satu instansi penyedia informasi merupakan sumber informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Keberadaan perpustakaan tersebut menuntut perpustakaan dan pustakawan sebagai pengelola perpustakaan untuk mampu memberikan kemudahan akses kepada masyarakat penggunaannya.

Sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) perpustakaan dipercaya sebagai *vehicle* untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut (Igbinoia, 2016) dalam *Library as Vehicle to Sustainable Development Goals (SDGs): Nigerian's Current Status and Outlook* (Library Hi-Tech News, July 2016 emerald DOI: 10.1108/lhtn-03-2016-0010). IFLA sebagai badan internasional asosiasi perpustakaan menyampaikan pentingnya peran perpustakaan dalam mendukung mewujudkan SDGs, diantaranya melalui akses terhadap informasi yaitu pada tujuan 16 “Peace and Justice” yang meliputi “*promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels*” dalam target 16.10 yaitu “*ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements*”.

Dari beberapa tujuan-tujuan SDGs, perpustakaan dapat berperan hampir di semua tujuan-tujuan dalam SDGs dan yang paling dominan kontribusi perpustakaan adalah melalui penyediaan akses terhadap informasi dan *Information Communication Technology (ICT)*, sehingga upaya yang perlu dilakukan oleh perpustakaan adalah menyediakan akses tersebut dan membangun keterampilan penggunaan ICT untuk dapat melakukan akses terhadap informasi di era sekarang untuk membangun masyarakat literat.

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang ada di perguruan tinggi dan memiliki fungsi untuk mendukung visi dan misi perguruan tinggi serta menjalankan tridarma perguruan tinggi. Salah satu unsur dari tridarma perguruan tinggi adalah melakukan pengabdian terhadap masyarakat dan hal yang dapat dilakukan oleh perpustakaan terkait dengan pengabdian terhadap masyarakat dan peran serta dalam pengembangan masyarakat disamping mendukung program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah adalah dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut satu diantaranya adalah melalui penyediaan fasilitas *open access* bagi masyarakat.

II. PEMBAHASAN

2.1 Masyarakat Literat

Literasi adalah sebuah konsep yang memiliki makna yang kompleks, dinamis, yang diinterpretasikan dan didefinisikan secara beragam dan dari berbagai sudut pandang. Secara istilah literasi berasal dari kata “literatus” yang merupakan Bahasa Latin dan memiliki arti “a learned person” atau orang yang belajar, sedangkan dalam Bahasa Indonesia literasi diartikan sebagai keberaksaraan atau melek aksara yaitu kemampuan menulis dan membaca. Literasi secara sederhana didefinisikan sebagai kualitas atau kemampuan melek huruf/aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis.

National Institute for Literacy memberikan definisi yang lebih luas terhadap pengertian literasi, yaitu “kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat” (Jawa Barat, 2016). Llyod (1972) menyebut literasi sebagai “conscientization” yaitu proses belajar yang bertujuan melahirkan kesadaran kritis individual atau kelompok yang bersifat otonom, memanusiakan, dan memerdekakan. Artinya literasi menyangkut sebuah proses penanaman metode berpikir yang bermanfaat bagi pembangunan manusia.

Saat ini ada bermacam-macam literasi misalnya literasi informasi (*information literacy*), literasi media (*media literacy*), literasi komputer (*computer literacy*), dan literasi ekonomi (*economy literacy*) sehingga literasi dapat diartikan melek informasi, melek teknologi, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan. Seseorang dikatakan literat atau memiliki kemampuan literasi apabila ia sudah dapat memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut.

UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemampuan literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga dan masyarakat karena sifatnya yang *multiple-effect* yaitu memberikan efek untuk ranah yang lebih luas. Kemampuan literasi membantu untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, diantaranya membantu memberantas

kemiskinan, mengurangi angka kematian, meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan, dan membantu mewujudkan perdamaian.

Masyarakat literat disebut juga sebagai masyarakat berkebudayaan baca-tulis yaitu masyarakat yang menjadikan kegiatan membaca dan menulis sebagai bagian dari tradisi hidupnya. Kebalikan dari masyarakat literat yaitu masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis disebut sebagai masyarakat illiterate. Adapun masyarakat yang dapat membaca dan menulis tetapi tidak menjadikan aktivitas membaca tersebut sebagai bagian dari tradisi hidupnya disebut sebagai masyarakat aliterat.

Masyarakat yang literat adalah hasil dari aktivitasnya dalam bidang literasi. Literasi disini bukan hanya diartikan sebagai aktivitas membaca dan menulis saja, tetapi juga mencakup keberpahaman seseorang pada bidang-bidang tertentu, mampu memilih dan memilah informasi, berbudaya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Masyarakat literat tidak muncul begitu saja, tetapi membutuhkan proses panjang dan sarana yang kondusif. Proses ini dimulai dari kecil dan dari lingkungan keluarga, kemudian didukung dan dikembangkan disekolah, di lingkungan masyarakat dan lingkungan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa budaya literasi sangat terkait dengan pola pembelajaran di sekolah dan ketersediaan bacaan atau akses informasi (*access to information*) di perpustakaan yang merupakan salah satu lembaga penyedia informasi.

2.2 Pembangunan Berkelanjutan

Definisi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) telah banyak dikemukakan, disarankan atau diperdebatkan, dan pada akhirnya menghasilkan suatu konsep yang luas dan secara sistematis menjadi ambigu. Dalam evolusi konsep pembangunan berkelanjutan, UNESCO (2006) menyajikan tujuh tonggak dalam pengembangan konsep dan proyek pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dikutip oleh Bholá dan Gomez (2008):

1. 1972: Konferensi PBB tentang lingkungan manusia di Stockholm mengarah pada penciptaan program lingkungan yaitu *The United Nations Environmental Programme* (UNEP)
2. 1987: “Our Common Future” atau “Masa depan kita bersama”, laporan Komisi Brundtland, mempopulerkan istilah pembangunan berkelanjutan.
3. 1992: Agenda 21 diadopsi pada KTT Bumi (*earth summit*) di Rio de Janeiro sebagai dasar untuk mengukur kemajuan dalam pembangunan berkelanjutan.
4. 1999: Peluncuran indeks keberlanjutan global yang melacak praktik perusahaan.
5. 2000: Deklarasi milenium, yang diadopsi oleh UN *General Assembly*; mendefinisikan “*respect for nature*” sebagai nilai fundamental dan berkomitmen “ untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan negara. ”
6. 2002: KTT dunia tentang pembangunan berkelanjutan di Johannesburg mempromosikan perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai saling bergantung dan saling menguatkan.
7. 2005: Dekade pendidikan PBB untuk pembangunan berkelanjutan (*The UN decade of education for sustainable development/DESD*) diluncurkan untuk memajukan pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk transformasi sosial yang tahan lama.

Tonggak-tonggak ini menurut UNESCO (2006) mengarah pada pengembangan lebih lanjut dari konsep pembangunan berkelanjutan yang pada gilirannya menjadi terkait dengan paradigma pengurangan kemiskinan serta semua bentuk inklusi, sebagian besar terkait dengan keuangan dan pembangunan kebutuhan informasi masyarakat. Laporan Komisi Brundtland ‘Our Common Future’ tahun 1987 yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”, telah menjadi standar yang diterima untuk konsep pembangunan berkelanjutan.

Berkaitan dengan definisi Komisi Brundtland 1987 terdapat tiga komponen yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur pembangunan berkelanjutan, yaitu; pertumbuhan

ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Harapan-harapan ini dapat dicapai secara bertahap dengan mengubah cara-cara kita mengembangkan dan menggunakan teknologi melalui pendidikan keaksaraan (*literacy education*) sebagai pusat perhatian bersama. Pemahaman yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (1992) dalam menangani tantangan pembangunan dan lingkungan melalui kemitraan global, menyusun agenda 21, dan hal yang merupakan aspek-aspek kunci atau elemen keberlanjutan yaitu: pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, keadilan sosial, pemerintahan yang demokratis dan efektif (Hussen, 2004).

Kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan dapat diukur juga dengan berbagai indikator yang berlaku di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Indikator-indikator tersebut termasuk kinerja ekonomi, keadilan sosial, ukuran lingkungan dan kapasitas kelembagaan. Karena pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi namun meluas jauh di atas masalah ekonomi, karena menghubungkan ekonomi, lingkungan dan masyarakat sehingga dengan demikian tidak ada teori atau prinsip ekonomi yang komprehensif yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, terdapat kerangka pemikiran mengenai pembangunan berkelanjutan yang memiliki pemikiran bahwa lingkungan yang sehat sangat penting untuk mendukung ekonomi dan pengembangan pengetahuan, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang dibuat harus memperhitungkan keabsahan sumber daya yang ada saat ini dan masa depan untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan. Atribut-atribut ini dapat dipertahankan melalui pendidikan keaksaraan/ *literacy education* (Hussen, 2004; Wiek, Withycombe, & Redman, 2011)

Tillbury (2011) menyampaikan bahwa literasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan tidak hanya sekedar proses menyampaikan pengetahuan baru, tetapi hal itu juga berarti belajar untuk mengajukan pertanyaan kritis, membayangkan masa depan yang lebih positif, klarifikasi nilai-nilai pada diri sendiri, berfikir secara sistematis, responsif dan mengeksplorasi hal-hal baru yang bersifat inovasi.

Setelah individu memperoleh keberlanjutan dalam literasi, maka menjadi suatu hal yang mungkin memberdayakan individu dalam: a. melakukan pendekatan pada masyarakat dengan kritis, b. memajukan pengetahuan individu lain, c. membuat keputusan, d. berkontribusi pada pemikiran interpersonal, kelompok, masyarakat dan lingkungan (Berstschy et al., 2013; Nolet, 2009; Stibble & Luna, 2009).

Isu yang menarik adalah literasi merupakan dasar dalam konteks andragogi yang memfasilitasi orientasi dan perubahan sikap masyarakat untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi individu dan kelompok untuk mengarahkan pada masyarakat literat untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan. Hubungan antara *literacy education* dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. *Literacy: a driver for sustainable development* (Sumber: UNESCO, 2016)

Perpustakaan dan akses terhadap informasi memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan nasional terutama dalam membangun masyarakat literasi. Akses publik

terhadap informasi mendukung penciptaan pengetahuan pada masyarakat, termasuk infrastruktur, ICT, media, dan kemampuan literasi informasi yang diperlukan masyarakat untuk menggunakan informasi secara efektif dan memelihara untuk menjaga agar akses dapat digunakan oleh generasi yang akan datang.

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) menyampaikan bahwa perpustakaan dapat mendorong kemajuan di seluruh Agenda 2030 PBB dan kontribusi terbesar dari perpustakaan terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah melalui penyediaan akses terhadap informasi dan *information, communication technology (ICT)*.

2.3 Open Access

Perpustakaan mendukung tujuan SDGs dan berperan dalam: “*academic libraries provide resources, translate complex data into publicly access information, closing gaps in access to information. Through open access in scholarly communication and through collaboration libraries are advancing digital inclusion*”. (perpustakaan akademik menyediakan sumber daya, menerjemahkan data kompleks menjadi informasi akses publik, menutup kesenjangan dalam akses ke informasi. Melalui akses terbuka dalam komunikasi ilmiah dan melalui kolaborasi perpustakaan-perpustakaan untuk memajukan inklusi digital).

Goal 4 pada SDGs yaitu “*ensure inclusive and equitable quality education and promote life long learning opportunities for all*”, merupakan dasar perpustakaan untuk menjadi jantung sekolah, universitas, dan perguruan tinggi di setiap negara yang ada di dunia, mendukung program-program literasi, menyediakan ruang yang nyaman untuk belajar, dan mendukung para peneliti untuk menggunakan kembali penelitian dan data-data penelitian yang dapat menciptakan pengetahuan yang baru. Hal-hal inilah yang difasilitasi perpustakaan dalam perannya untuk menyediakan akses terhadap informasi (*access to information*).

Perpustakaan akademik sebagai salah satu unit pusat pada lembaga pendidikan menghadapi tantangan karena harus menyelaraskan tujuan perpustakaan dengan peran dan tuntutan-tuntutan yang semakin luas dari lembaga induk yaitu perguruan tinggi dimana perpustakaan berada. Secara historis, keberadaan perpustakaan sebagai penjaga informasi

dan pengetahuan (*custodian information and knowledge*) adalah untuk mengidentifikasi, mengatur, mendeskripsikan, dan menyediakan sistem yang dapat memudahkan komunitas universitas untuk mengakses informasi dan pengetahuan (Hayes & Kent, 2010). Perpustakaan akademis harus bergerak dari peran informasi pada peran “resources-based and collaborative” yaitu peran yang mengharuskan berkolaborasi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, munculnya inovasi di bidang teknologi serta pengguna informasi yang melek teknologi mengharuskan perpustakaan untuk mengubah cara mereka memberikan informasi kepada penggunanya.

David Weinberger menyarankan perpustakaan sebagai “platform terbuka”, yang terbuka tidak hanya untuk pembuatan perangkat lunak, tetapi juga untuk pengembangan pengetahuan dan komunitas. Weinberger menyampaikan bahwa perpustakaan seharusnya membuka akses terhadap seluruh koleksi, metadata, dan teknologi apapun yang mereka miliki dan ciptakan, serta mempersilahkan siapapun untuk membangun produk baru dan layanan diatas dasar landasan platform terbuka tersebut. Hal ini menjelaskan perpustakaan sebagai infrastruktur sosial, teknik, dan intelektual harus lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna di waktu yang selalu berubah.

Akses terbuka terhadap informasi (*open access*) menjadi layanan yang disediakan oleh perpustakaan. Tidak hanya terbuka secara infrastruktur dan sistem namun terbuka juga untuk diakses oleh masyarakat luas yang berkaitan dengan program-program pengembangan pengetahuan. Pengertian *open access* berkaitan dengan infrastruktur dan sistem adalah ketersediaan informasi ilmiah yang secara *online* dapat diakses secara gratis tanpa hambatan biaya maupun hak cipta.

Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) memberikan pengertian *open access* sebagai:

“...the free, immediate, availability on the public Internet of those works which scholars give to the world without expectation of payment – permitting any user to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full text of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software or use them for any other lawful purpose”

Pada ranah *open access* mensyaratkan literatur harus tersedia segera, tanpa halangan biaya dan teknis, serta dapat digunakan untuk berbagai pemanfaatan dengan tetap memberikan hak pengakuan dan pengutipan kepada penulis (Budapest Open Access Initiative, 2002). *Open access* memiliki beberapa manfaat, yaitu ketersediaan sumber informasi tidak terbatas, merangsang penelitian lanjutan yang lebih baik, menerbitkan insiprasi atau ide, meningkatkan inovasi dan pengembangan lanjutan, pertumbuhan data, informasi dan publikasi ilmiah, memicu perkembangan intelektualitas masyarakat.

Beberapa upaya berkaitan dengan peran pustakawan dan perpustakaan dalam membangun masyarakat literat melalui penyediaan open access dapat dilakukan dengan (Priyanto, 2018):

1. Mengembangkan konten repositori *Open Access* (OA).
2. Menentukan tesis, disertasi, dokume dan data institusi, & file lainnya yang bisa diakses publik.
3. Memilih software OA yang sesuai dan mudah digunakan.
4. Bisa mengembangkan *subject repository* OA
5. Membantu peneliti & tenaga pendidik memperoleh sumber informasi ilmiah.
6. Mengupayakan ketersediaan preprint & postprint, disertasi, tesis, laporan penelitian, & sumber daya ilmiah lain yang memberi manfaat besar dalam pengembangan pengetahuan & komunikasi ilmiah.
7. Tradisi penyediaan sumberdaya informasi semacam itu sudah dilakukan di perpustakaan namun pelayanannya sangat terbatas.
8. Menjadikan sumberdaya informasi lebih *visible* dan *accessible*, dan karenanya akan lebih banyak memberi manfaat bagi banyak orang.
9. Bisa menyimpan *research documents*, data, dan sumberdaya repositori lainnya untuk dapat digunakan lembaga di masa mendatang.
10. Hunters (2012): Perpustakaan menjadi semacam *digital publishing* dengan menyediakan sumber-sumber digital untuk para penggunanya.
11. Menjadi sumber sekaligus penerbit.

12. Di masa mendatang akan memiliki peran lebih penting sebagai penerbit dan pendiseminasi pengetahuan.
13. “important support for research and scholarly communication” (McKee, Stamison, and Bahnmaier, 2014, p. 190).
14. Membantu peneliti mendapatkan sumber-sumber OA dengan mengkompilasi dan indexing situs web OA
15. Penyedia akses hasil-hasil penelitian dan dokumen lain terkait dengan output lembaga dalam bentuk repositori OA.
16. Berkontribusi dalam komunikasi ilmiah dengan menyediakan dan memasarkan sumber-sumber informasi, bukannya menyimpan dan menjaga agar tidak digunakan pemustaka.
17. Membuka pintu komunikasi ilmiah dengan penyediaan repositori OA.

Upaya-upaya tersebut memperlihatkan adanya pergeseran peran pustakawan di perpustakaan, pustakawan dituntut untuk tidak hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan *core business* (seperti klasifikasi, katalogisasi, *indexing*) namun pustakawan harus mampu menyesuaikan pekerjaan dengan tuntutan pengguna dan lingkungannya, seperti terlibat dalam pembangunan repositori dan komunikasi ilmiah.

Open access pada perpustakaan disini tidak hanya terbatas pada akses koleksi secara *online* dan terbuka, namun juga terbuka untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan dan komunitas. Perpustakaan membuka pintu selebar-lebarnya untuk kegiatan tersebut, sejalan dengan program IFLA dalam menunjang pembangunan berkelanjutan perpustakaan diharapkan dapat berperan menjadi pihak yang mampu menutup kesenjangan dalam mengakses informasi dan upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan ruang-ruang terbuka di perpustakaan untuk mengakses informasi dan pengembangan pengetahuan yang bisa saja berbentuk aktivitas *knowledge sharing*. Melalui aktivitas-aktivitas tersebut menjadi sarana untuk membangun proses literasi.

2.4 *Open Access* pada Telkom University Open Library

Perpustakaan Telkom University adalah perpustakaan perguruan tinggi yang terdapat di Telkom University. Seperti perpustakaan perguruan tinggi pada umumnya keberadaan perpustakaan Telkom University adalah untuk mendukung kegiatan akademik dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan mendukung mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi.

Perpustakaan Telkom University atau dikenal dengan *brand name* Open Library memiliki konsep sebagai perpustakaan terbuka yang memiliki filosofi dalam melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan, yaitu:

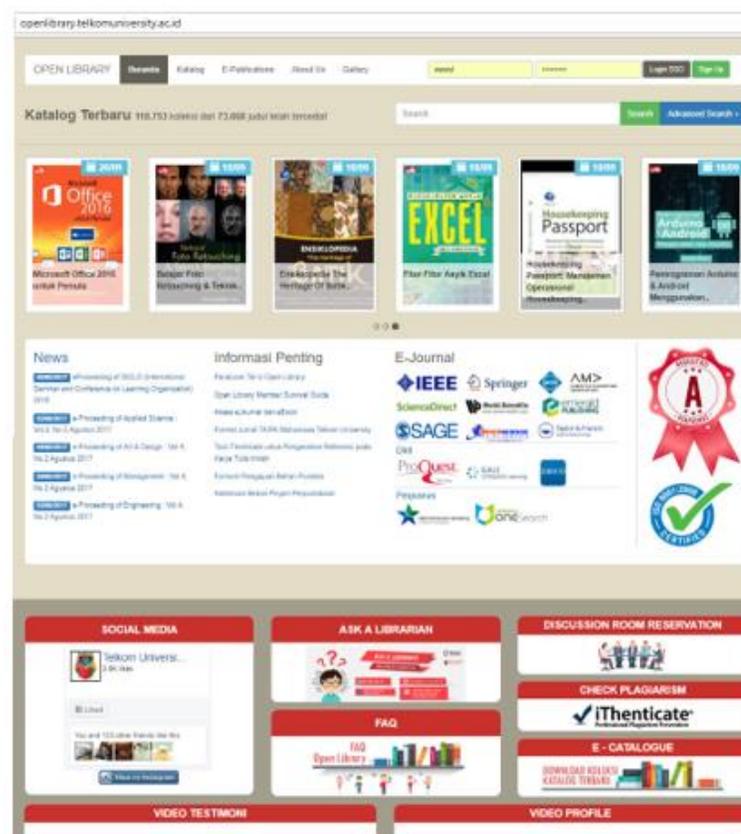
1. *Open* untuk menerima dan mengelola berbagai jenis pengetahuan
2. *Open* untuk *sharing* katalog dan *resources* dengan institusi lain
3. *Open* untuk siapa pun yang ingin berbagi pengetahuan

Prinsip-prinsip inilah yang melandasi berbagai kegiatan dan program kerja di Telkom University Open Library. Prinsip *open* untuk menerima dan mengelola berbagai jenis pengetahuan adalah dasar yang melandasi Open Library untuk menerima dan mengelola berbagai pengetahuan, tidak hanya pengetahuan dalam bentuk *explicit knowledge* namun juga Open Library berusaha untuk mengelola *tacit knowledge* yang didapat dan dihasilkan oleh sivitas akademika maupun pihak eksternal non-sivitas.

Prinsip *open* yang kedua, yaitu *open* untuk berbagi katalog dan sumber daya dengan institusi lain, merupakan semangat kerjasama Open Library untuk bekerjasama dan *sharing* dengan pihak lain sebagai upaya menunjukkan dukungan terhadap penyediaan informasi dan keterbukaan akses dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Open library secara infrastruktur sudah memfasilitasi agar dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai institusi, baik institusi pendidikan atau pun non-pendidikan. Arsitektur system informasi Open Library dilengkapi dengan fasilitas OAI-PMH (*Open Achieve Initiative-Protocol Metadata Harvesting*) sehingga memungkinkan untuk melakukan pertukaran data maupun konten dengan sistem informasi yang lainnya dalam menyediakan sumber daya informasi yang diperlukan oleh masyarakat pengguna perpustakaan.

Prinsip *open* ketiga dari Open Library adalah *open* bagi siapa pun yang ingin berbagi pengetahuan, tidak terbatas pada organisasi namun membuka kesempatan juga bagi personal dan komunitas. Hal ini dilakukan dengan memberikan ruang-ruang publik bagi seluruh masyarakat, memfasilitasi mereka untuk mendapatkan kesetaraan dalam mengakses informasi, menggunakan teknologi untuk mencari sumber informasi, dan mengakses area-area di perpustakaan yang mampu menciptakan pengetahuan baru dan inovasi.

Untuk memfasilitasi kemudahan akses terhadap informasi, Telkom University Open Library membuat dan melayani fasilitas website yang dapat diakses oleh semua orang, tidak terbatas pada sivimasyarakat Telkom University namun juga memfasilitasi masyarakat umum. Setiap orang dapat mengakses dan menggunakan informasi yang ada pada website Telkom University Open Library. Layanan Telkom University Open Library dapat diakses pada openlibrary.telkomuniversity.ac.id.



Gambar 3: openlibrary.telkomuniversity.ac.id

Telkom University Open Library tidak hanya memberikan perhatian dan menyediakan akses secara *online* kepada masyarakat pengguna, untuk kegiatan pengembangan pengetahuan dan komunitas Tel-U Open Library memfasilitasi area dan sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. *Open Discussion* adalah program pengembangan pengetahuan dan kegiatan komunitas yang diselenggarakan Open Library untuk masyarakat luas. *Workshop*, seminar, diskusi, atau pun kegiatan berbagi pengetahuan yang lainnya difasilitasi melalui program ini. Tujuan dari program ini adalah menerapkan program literasi aplikatif yang tidak hanya untuk mempertemukan individu-individu yang memiliki *interest* yang sama tetapi juga diharapkan mampu mengembangkan kemampuan literasi masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kehidupan individu secara sosial maupun ekonomi di lingkungan dan masyarakat.



Gambar 4: Kegiatan *Open discussion*- berbagi pengetahuan di Open Library

Komitmen untuk melakukan *open access* memunculkan tuntutan bagi pustakawan sebagai pengelola dan penggerak perpustakaan. Pustakawan harus memosisikan diri sebagai penghubung (*liaison*) antara masyarakat dengan perpustakaan. Menurut Schlak (2016) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membangun *liaison librarianship* untuk meningkatkan kapasitas sosial masyarakat melalui peran perpustakaan perguruan tinggi

yang meliputi: berbagi komitmen (*shared commitment*), dinamika hubungan (*interrelational dynamics*), dan posisi jaringan (*network positionality*). Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam fokus internal dan eksternal, dan dapat dijabarkan sebagai sebagai berikut:

Tabel 1. Fokus Pembangunan *Liaison Librarianship*

| No. | Fokus Internal | Fokus Eksternal |
|-----|---|---|
| 1 | Bebagi Komitmen | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan akses informasi ke mahasiswa - Komitmen mendukung aktivitas pembelajar di fakultas - Menyediakan instruksi dalam proses penyediaan sumber daya penelitian - Bekerja melayani kebutuhan informasi akademik - Keinginan pustakawan untuk membantu aktivitas pembelajaran di fakultas | <ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran mahasiswa - Minat dan keahlian di bidang studi - Memfasilitasi penelitian mahasiswa |
| 2 | Dinamika Hubungan | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun kepercayaan - Komitmen dan profesional membangun kemitraan - Membangun hubungan personal - Mencapai hasil yang lebih luas dengan dukungan mitra fakultas - Membangun jaringan kerjasama - Memberikan manfaat bagi akademik | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi yang berguna, relevan, dan tepat waktu - Menemukan mitra yang dapat dipercaya - Mengadvokasi hubungan kerjasama - Mempromosikan instruksi dan bantuan penelitian - Membangun kontak/hubungan yang lebih luas |

| 3 | Posisi Jaringan | |
|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - membantu perpustakaan mencapai visi/misi lembaga - pengembangan koleksi melalui kemitraan - memperkuat peran perpustakaan bagi masyarakat - meningkatkan keahlian pustaka melalui kegiatan di luar lembaga - pustakawan sebagai mitra dan kolaborator untuk fakultas | <ul style="list-style-type: none"> - Mengadvokasi program literasi informasi - Pengembangan koleksi untuk mendukung keilmuan - Menyediakan teknologi untuk bantuan penelitian - Membangun kepercayaan dan keahlian profesional dari mitra - Berpartisipasi dalam kehidupan intelektual dan administrasi lembaga |

Sumber: Schalk (2016)

Fokus pembangunan *liaison librarianship* merupakan rangkaian aktivitas pustakawan yang merupakan jawaban atas tuntutan perkembangan dan perubahan paradigma perpustakaan. Pustakawan tidak lagi hanya menyediakan informasi, tetapi mereka bergerak berkolaborasi bersama fakultas sebagai pihak internal institusi dan pihak eksternal membangun komunikasi ilmiah (*scholarly communication*) untuk menyediakan sumber-sumber dan akses terhadap informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi masyarakat dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan agenda universal.

Memiliki komitmen untuk menyediakan sumber-sumber informasi yang dapat membantu dan menunjang kegiatan masyarakat pengguna perpustakaan adalah fokus kerja *liaison librarian*, disamping itu seorang pustakawan dituntut untuk dapat membangun dan terlibat dalam dinamika relasi dengan berbagai pihak, mulai dari menumbuhkan kepercayaan bahwa perpustakaan mampu memenuhi harapan penggunanya sampai pada membangun dan

memelihara kerjasama dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan yang muncul dari pengguna.

Selain pengembangan yang berfokus pada internal, seorang pustakawan juga harus memiliki fokus eksternal dalam rangka menjadi *liaison librarian* yaitu melalui komitmen dalam memberikan bantuan untuk memfasilitasi penelitian mahasiswa, membangun hubungan melalui layanan informasi yang berguna dan relevan serta membina hubungan kerjasama, dan untuk memperluas jaringan seorang pustakawan *liaison* harus mampu menyelenggarakan program literasi informasi, menyediakan teknologi untuk mempersempit kesenjangan dalam akses informasi, dan mampu membangun kepercayaan dari mitra kerja dengan menunjukkan profesionalisme pustakawan.

Telkom University Open Library berusaha untuk dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan lingkungan, dan hal tersebut direalisasikan melalui program-program kerja yang dimiliki dan dilaksanakan oleh perpustakaan. Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan 1. *Quality improvement* yang memiliki program pengembangan sumber daya manusia, peningkatan layanan pengguna, dan peningkatan infrastruktur dan fasilitas; 2. *Library awareess* melalui program-program yang mengikutsertakan dan berkolaborasi dengan pihak luar atau masyarakat umum seperti *library open discussion* dan *literacy event*; 3. *Collaboration* yaitu berkolaborasi dengan pihak eksternal dan internal dalam rangka pengembangan perpustakaan. Hal-hal tersebut ditujukan dalam rangka mendukung tujuan-tujuan internal yang dimiliki institusi dan secara eksternal merupakan program untuk mendukung proses pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

PENUTUP

Masyarakat literat diyakini sebagai pendukung keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kemampuan literasi masyarakat merupakan faktor untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menghasilkan masyarakat literat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Perpustakaan sebagai salah satu pihak yang

memiliki kontribusi dan peran penting dalam mewujudkan masyarakat literat. Penyediaan akses terhadap informasi dan penggunaan fasilitas teknologi adalah kendala yang dihadapi untuk perkembangan literasi di masyarakat. Konsep perpustakaan mempengaruhi bagaimana perpustakaan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan UN melalui UNESCO dengan program literasi. Penerapan konsep *open access* pada perpustakaan adalah salah satu cara untuk mendukung program literasi, melalui *open access* ini akses terhadap informasi (*access to information*) dan penggunaan ICT ataupun pengembangan pengetahuan pada masyarakat pengguna dapat difasilitasi. Hal ini tidak dapat mengesampingkan pustakawan sebagai pengelola dan pelaksana perpustakaan, dan melalui perannya sebagai *liaison librarian* pustakawan bergerak untuk mengimbangi kebutuhan dan perubahan-perubahan yang terjadi lingkungannya, serta mampu memberikan kontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. **Bertschy**, F., Kinzli, C., & Lehmann, M. (2013). Teachers' competencies for the implementation of educational offers in the field of education for sustainable development. *Sustainability*, 5, 5067-5080.
2. **Bhola**, H.S. & Gomez, S.V. (2008). *Signposts to literacy for sustainable development complementary studies*. Hamburg: UNESCO.
3. **Hussen**, A. (2004). *Principles of environmental economics*. New York: Routledge.
4. **Lloyd**, Arthur S. (1972). Freire, Conscientization, and Adult Education. *Adult Education*. Vol.XXIII, No.1, 3-20
Diakses dari <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/074171367202300101>
5. **Nolet**, V. (2009). Preparing sustainability-literate Teachers College Record, 111(2), 409-422.
6. **Schlak**, T. (2016). Social capital as Operative in Liasion Librarianship: Librarian Participants' Experiences of Faculty Engagement as Academic Librarian Liaisons. *The Journal of Academic Librarianship*, 1-2.
Diakses dari <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2016.04.008>
7. **Stibbe**, A. & Luna, H. (2009). Introduction. In A. Stibbe & H. Luna (Eds), *The Handbook of sustainability Literacy Skills for a changing World* (pp. 9-16). Cornwall, UK: Green Books Ltd.
8. **UNESCO** (2006). *Education Today: The newsletter of UNESCO's education sector*. No. 16 February- Mary, p. 7
9. **Wiek**, A., Withycombe, L., & Redman, C. L. (2011). Key competencies in sustainability: a reference framework for academic program development. *Sustainability Science*, 6(2), 203-218.